

Abstrak

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai pengguna anggaran bertanggungjawab dalam menyusun laporan keuangan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku umum. Dalam meningkatkan pelayanan publik, Dinas Kehutanan melakukan pengeluaran untuk memperoleh tetap atau aset lainnya melalui mekanisme belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah praktik akuntansi belanja modal pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah metode studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait objek penelitian dan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku untuk dibandingkan dengan data yang telah diperoleh. Metode lainnya dilakukan dengan cara mengobservasi mekanisme belanja modal secara langsung. Penelitian ini juga dilanjutkan dengan pelaksanaan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak seluruhnya menerapkan akuntansi belanja modal dengan sesuai dikarenakan adanya temuan berupa kendala teknis yang menyebabkan kekeliruan dalam pengklasifikasian aset, dan kesalahan dalam mengakui belanja modal yang tidak memenuhi atas minimum kapitalisasi aset. CaLK diungkapkan kurang memadai dikarenakan terlampaikan oleh temuan-temuan ini.

Kata kunci: Belanja Modal, Peraturan, Batas Minimum Kapitalisasi Aset, Pemerintah

Abstract

Jambi Provincial Forestry Service as a budget user has a responsible in preparing financial statements according to generally accepted accounting policies. In order to improve public services, Jambi Provincial Forestry Service organizes expenditure to acquire fixed assets or other assets through the mechanism of capital expenditure. This study aims to examine whether the capital expenditure accounting practices of Jambi Provincial Forestry Services are in accordance with applicable regulations and policies. The method used in this study is literature study by collecting data and information related to the research object and inspecting applicable regulations for comparing to the obtained data. Another method runs by observing capital expenditure mechanism directly. This study is sustained by interviewing the related parties. This study shows that Jambi Provincial Forestry Service does not entirely apply capital expenditure properly due to findings in the form of technical problem that cause asset misclassification and capital expenditures misrecognition that do not reach the minimum asset capitalization limit. Notes to financial statement disclosed inadequate due to these findings.

Keywords: Capital Expenditure, Regulations, Minimum Asset Capitalization Limit, Government